

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KOTA PEKALONGAN
PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN**

LAPORAN KEUANGAN

**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2022**

Dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

***BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN***

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN.....	1
SURAT PERNYATAAN KEPALA PUSKESMAS	2
SURAT PERNYATAAN IZIN CETAK.....	3
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	4
LAPORAN KEUANGAN	
Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023.....	5
Laporan Saldo Anggaran Lebih Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023	6
Laporan Neraca Per 31 Desember 2023 dan 2022	7
Laporan Operasional Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.....	8
Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	9
Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	10
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
Gambaran Umum	11
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi.....	13
Penjelasan Pos-Pos Neraca dan Laporan Operasional	18

*BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN*

SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

Jalan HOS Cokroaminoto No. 347 Pekalongan Kode Pos 51135

Telp. 420962 Pos-el: puskpeklselatan347@gmail.com

Laman: <https://pkm-pekalonganselatan.pekalongankota.go.id/>

SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN

Kepada Yth.

AP Tarmizi Achmad

Kantor Akuntan Publik *Tarmizi Achmad*

Jalan Dewi Sartika Raya No.7

Perum Undip Sukorejo Gunungpati Semarang

Kami memberikan representasi ini sehubungan dengan audit Saudara atas Laporan Keuangan **Puskesmas Pekalongan Selatan** Tahun 2023 yang ditujukan untuk menyatakan apakah laporan keuangan telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan surplus/defisit dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

Kami menegaskan, berdasarkan keyakinan pengetahuan terbaik kami, representasi berikut ini telah kami buat kepada Saudara selama audit Saudara :

1. Laporan keuangan yang disebut diatas disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
2. Kami telah menyediakan kepada Saudara semua catatan akuntansi dan data lain yang berkaitan.
3. Tidak ada transaksi material yang belum dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi yang melandasi laporan keuangan.
4. Tidak terdapat transaksi material yang tidak secara semestinya dicatat dalam catatan akuntansi yang melandasai laporan keuangan.
5. Kami tidak memiliki rencana atau maksud yang dapat berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan.
6. Tidak ada ;
 - a. Kecurangan yang melibatkan manajemen atau karyawan yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern
 - b. Kecurangan yang melibatkan karyawan lain yang dapat berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

Jalan HOS Cokroaminoto No. 347 Pekalongan Kode Pos 51135

Telp. 420962 Pos-el: puskpeklselatan347@gmail.com

Laman: <https://pkm-pekalonganselatan.pekalongankota.go.id/>

7. Tidak terdapat kemungkinan unsur tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang berdampak harus dipertimbangkan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Kami telah mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, termasuk ketentuan perpajakan, pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan lain yang terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang Undang Perbendaharaan serta peraturan terkait lainnya.

Menurut pengetahuan dan keyakinan kami, tidak ada peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan sampai dengan tanggal surat ini dibuat yang memerlukan menyesuaikan atau pengungkapan dalam laporan keuangan tersebut.

Pekalongan, 30 Maret 2024

Kepala Puskesmas



D. ASWINA AZIS MICHROZA
NIP. 19810824 200902 1 001

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

SURAT TANGGUNGJAWAB LAPORAN
KEUANGAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
Jalan HOS Cokroaminoto No. 347 Pekalongan Kode Pos 51135
Telp. 420962 Pos-el: puskpeklselatan347@gmail.com
Laman: <https://pkm-pekalonganselatan.pekalongankota.go.id/>

SURAT PERNYATAAN KEPALA PUSKESMAS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
“PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN”

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aswina 'Azis Michroza
Perusahaan : Puskesmas Pekalongan Selatan
Alamat : Jl. Sutan Syahrir Gg.4 No.295 Rt.01 Rw.03
Kel.Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat
Jabatan : Kepala Puskesmas

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Puskesmas Pekalongan Selatan;
2. Laporan Keuangan Puskesmas Pekalongan Selatan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Puskesmas Pekalongan Selatan; telah dicatat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Puskesmas Pekalongan Selatan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Puskesmas Pekalongan Selatan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Maret 2024

Kepala Puskesmas

ASWINA AZIS MICHROZA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

SURAT IZIN CETAK LAPORAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

Jalan HOS Cokroaminoto No. 347 Pekalongan Kode Pos 51135
Telp. 420962 Pos-el: puskpeklselatan347@gmail.com
Laman: <https://pkm-pekalonganselatan.pekalongankota.go.id/>

SURAT PERSETUJUAN
IZIN CETAK ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023
PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aswina 'Azis Michroza
Alamat kantor : Jl. Hos Cokroaminoto No.347
Alamat rumah
sesuai KTP : Jl. Sutan Syahrir Gg.4 No.295 Rt.01 Rw.03 Kel.Pasirkratonkramat
Kec. Pekalongan Barat
Jabatan : Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa:

Pihak Manajemen mengizinkan KAP Tarmizi Achmad untuk mencetak laporan keuangan **Puskesmas Pekalongan Selatan** serta lampirannya, untuk periode/tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 4 (empat) eksemplar.

Demikian surat persetujuan izin cetak ini dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Maret 2024

Kepala Puskesmas



dr. ASWINA AZIS MICHROZA
NIP. 19810824 200902 1 001

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

"TARMIZI ACHMAD"

NOMOR IZIN USAHA KAP: KEP. 09 I/KM. 6/2004

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00101/2.0604/AU.5/11/0430-4/1/III/2024

Kepada Yth.

Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Puskesmas Pekalongan Selatan

Jl. HOS Cokroaminoto No. 347

Kota Pekalongan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Puskesmas Pekalongan Selatan terlampir, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran serta Laporan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Puskesmas Pekalongan Selatan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Puskesmas Pekalongan Selatan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan etika tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang berlaku di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Puskesmas Pekalongan Selatan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali

Halaman 1 dari 3



manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Puskesmas Pekalongan Selatan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Puskesmas Pekalongan Selatan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Puskesmas Pekalongan Selatan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Puskesmas Pekalongan Selatan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Puskesmas Pekalongan Selatan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

“TARMIZI ACHMAD”

NOMOR IZIN USAHA KAP: KEP. 09 I/KM. 6/2004

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Semarang, 30 Maret 2024
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
“TARMIZI ACHMAD”

Prof. Dr. Tarmizi Achmad, MBA., Ak., CPA., CA., CFE., CFrA., CPI
Nomor Izin Akuntan Publik : 0430



*BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN*

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BLUD
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
 Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022
1	PENDAPATAN		
	Pendapatan Jasa Layanan	2.127.809.729,00	1.723.607.100,00
	Pendapatan APBD	1.015.070.000,00	844.585.000,00
	Pendapatan Hibah	-	-
	Pendapatan Hasil Kerjasama	3.120.000,00	2.920.000,00
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	428.947,00	315.812,00
	Jumlah Pendapatan	3.146.428.676,00	2.571.427.912,00
2	BELANJA		
	BELANJA OPERASI		
	Belanja Pegawai	753.747.617,00	415.297.529,00
	Belanja Barang & Jasa	2.176.937.687,00	2.019.041.400,00
	Belanja Lain-Lain	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	2.930.685.304,00	2.434.338.929,00
	BELANJA MODAL		
	Belanja Tanah		
	Belanja Peralatan dan Mesin	164.100.500,00	86.903.830,00
	Belanja Gedung dan Bangunan		21.315.959,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	Belanja Aset Tetap Lainnya		
	Belanja Aset Lainnya		
	Jumlah Belanja Modal	164.100.500,00	108.219.789,00
	Jumlah Belanja	3.094.785.804,00	2.542.558.718,00
	SURPLUS/ DEFISIT	51.642.872,00	28.869.194,00

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH BLUD

UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022

(Dinyatakan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	269.402.857,00	240.533.663,00
2	Penggunaan SAL	-	-
3	Subtotal (1-2)	269.402.857,00	240.533.663,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	51.642.872,00	28.869.194,00
5	Subtotal (3+4)	321.045.729,00	269.402.857,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
7	Lain-lain	-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	321.045.729,00	269.402.857,00

Saldo anggaran lebih sebesar Rp 321.045.729,00 terdiri dari Kas BLUD sebesar Rp 205.531.774 dan Kas BOK sebesar Rp 115.513.955.

UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
NERACA

Per 31 Desember 2023

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022

(Dinyatakan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Catatan	Tahun 2023	Tahun 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2a, 3	321.045.729,00	269.402.857,00
Piutang BLUD	2b, 4	25.575.000,00	25.170.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	2d, 5	(127.875,00)	(125.850,00)
Persediaan	2c, 6	219.722.265,06	262.554.031,03
JUMLAH ASET LANCAR		566.215.119,06	557.001.038,03
ASET TETAP			
Tanah	2e, 7	1.193.000.000,00	1.193.000.000,00
Peralatan dan Mesin		4.513.149.515,62	4.070.333.702,78
Gedung dan Bangunan		5.099.297.969,74	5.099.297.969,74
Jalan, Irigasi dan Jaringan		733.086.767,00	733.086.767,00
Aset Tetap Lainnya		457.500,00	957.500,00
Akumulasi Penyusutan		(4.534.121.099,62)	(4.716.997.026,78)
JUMLAH ASET TETAP		7.004.870.652,74	6.379.678.912,74
ASET LAINNYA	8		
Aset Lain-Lain -Aset Rusak		171.774.089,99	-
Akumulasi Aset Rusak		(159.673.196,99)	-
JUMLAH ASET LAINNYA		12.100.893,00	-
JUMLAH ASET		7.583.186.664,80	6.936.679.950,77
KEWAJIBAN	2.2, 9		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Belanja		139.535.196,00	104.652.992,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		139.535.196,00	104.652.992,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		139.535.196,00	104.652.992,00
EKUITAS			
Ekuitas	LPE	7.443.651.468,80	6.832.026.958,77
JUMLAH EKUITAS		7.443.651.468,80	6.832.026.958,77
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.583.186.664,80	6.936.679.950,77

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Disetujui,
Kepala UPT Puskesmas Pekalongan Selatan

dr. Aswina 'Azis Michroza
NIP. 198108242009021001

UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Catatan	Tahun 2023	Tahun 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa Layanan	10	2.128.165.579,00	1.712.365.075,00
Pendapatan Antar Entitas Akuntansi Dan Pelaporan	11	1.316.498.161,96	1.073.539.047,38
Pendapatan Hibah	12	-	-
Pendapatan Hasil Kerjasama	13	3.295.000,00	2.920.000,00
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	14	428.947,00	315.812,00
Pendapatan APBD	15	1.015.070.000,00	844.585.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		4.463.457.687,96	3.633.724.934,38
BEBAN			
Beban Pegawai	16	729.743.208,00	434.618.238,00
Beban Barang dan Jasa	17	3.053.998.685,93	2.970.631.602,83
Beban Penyisihan Piutang	19	127.875,00	125.850,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	18	130.456.437,00	231.756.547,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18	101.799.792,00	101.799.789,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	18	24.407.049,00	24.411.225,00
JUMLAH BEBAN		4.040.533.046,93	3.763.343.251,83
SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL		422.924.641,03	(129.618.317,45)
SURPLUS/DEFISIT - LO		422.924.641,03	(129.618.317,45)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Disetujui,
Kepala UPT Puskesmas Pekalongan Selatan

dr. Aswina 'Azis Michroza
NIP. 198108242009021001

UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS AWAL	6.832.026.958,77	6.898.311.626,22
2	SURPLUS/DEFISIT- LO	422.924.641,03	(129.618.317,45)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	188.699.869,00	63.333.650,00
	- Koreksi Ekuitas - Aset Tetap DINKES	-	59.204.050,00
	- Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Rusak Usang	-	-
	- Koreksi Ekuitas Ekstrakom DINKES	1.186.777,00	-
	-Koreksi Ekuitas - Transfer Persediaan Antar OPD	-	-
	-Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	279.866.008,17	-
	-Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	(92.352.916,17)	-
	- Koreksi Ekuitas - Persediaan Transfer	-	4.129.600,00
4	EKUITAS AKHIR	7.443.651.468,80	6.832.026.958,77

UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	2023	2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
	Arus Masuk Kas		
	Pendapatan Jasa Layanan	2.127.809.729	1.723.607.100,00
	Pendapatan Hibah		
	Pendapatan Hasil Kerjasama	3.120.000,00	2.920.000,00
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	428.947	315.812,00
	Pendapatan APBD	1.015.070.000	844.585.000,00
	Jumlah Arus Masuk	3.146.428.676	2.571.427.912,00
	Arus Keluar Kas		
	Belanja Pegawai	753.747.617	415.297.529
	Belanja Barang & Jasa	2.176.937.687	2.019.041.400
	Jumlah Arus Keluar Kas	2.930.685.304	2.434.338.929
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	215.743.372	137.088.983
2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
	Arus Masuk Kas		
	Penjualan atas Tanah	-	-
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
	Jumlah Arus Masuk	-	-
	Arus Keluar Kas		
	Perolehan Tanah		
	Perolehan Peralatan dan Mesin	164.100.500	86.903.830
	Perolehan Gedung dan Bangunan		21.315.959
	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	Jumlah Arus Keluar Kas	164.100.500	108.219.789
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(164.100.500)	(108.219.789)
3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	61.046.963	32.103.890
	Jumlah Arus Masuk	61.046.963	32.103.890
	Arus Keluar Kas		
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	61.046.963	32.103.890
	Jumlah Arus Keluar Kas	61.046.963	32.103.890
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-
	Kenaikan/ Penurunan Kas BLUD	51.642.872	28.869.194
	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	269.402.857	240.533.663
	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	321.045.729	269.402.857

*BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN*

***CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023*

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023

1. URAIAN SINGKAT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

a. Gambaran Umum

UPT Puskesmas Pekalongan Selatan Kota Pekalongan merupakan Unit Desa Kesehatan yang bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kesehatan di wilayah kerjanya meliputi Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan Kelurahan Soko Duwet. Sejak tahun 2013, UPT Puskesmas Pekalongan Selatan menerapkan PPK-BLUD berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/300 Tahun 2013 tentang Penetapan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal tersebut untuk merespon kebijakan pemerintah pusat tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bahwa pada tanggal 01 Januari 2014 BPJS Kesehatan akan mulai melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional tersebut akan bertumpu pada fasilitas kesehatan primer maupun sekunder. Agar dapat memberikan pelayanan yang baik, terjangkau dan profesional maka Puskesmas Kota Pekalongan harus dikelola secara profesional. Prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi, optimalisasi, *benefit*, dan *cost* harus menjadi indikator dalam pelaksanaannya.

UPT Puskesmas Pekalongan Selatan menerapkan pola pengelolaan BLUD secara mandiri sejak bulan Januari 2020. Hal ini sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 440/1205 Tahun 2019 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Pekalongan. Pola pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas Pekalongan Selatan merupakan pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

b. Visi, Misi dan Motto Puskesmas Pekalongan Selatan

Visi : "Mewujudkan Wilayah Puskesmas Pekalongan Selatan yang Lebih Sehat, Mandiri dan Sejahtera."

- Misi :
1. Mengoptimalkan peran lintas sector dan lintas program dalam program pemberdayaan kesehatan masyarakat.
 2. Bersinergi Bersama masyarakat untuk lebih mandiri dalam meningkatkan derajat kesehatan.
 3. Meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
 4. Memberikan layanan kesehatan dengan tenaga yang profesional dan berkualitas dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien.
 5. Membuat data kesehatan yang akuntabel sebagai acuan penyusunan program kesehatan.

Motto : "Yang Terbaik Setiap Saat"

c. Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja pegawai, dan untuk memberikan kejelasan kedudukan, tanggung jawab, wewenang serta uraian tugas, maka perlu dilakukan penataan struktur organisasi di UPT Puskesmas Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 954/0004 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 954/0783 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	dr. Aswina 'Azis Michroza	Kepala UPT Puskesmas Pekalongan Selatan
2.	Evi Nur Afida, SKM	Pelaksana Tata Usaha
3.	Tisyana Fibrianti, S.ST.	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Puskesmas
4.	Nur Rachmawati, AMK	Penanggung Jawab UKM Pengembangan
5.	dr. Rizki Murtrinda	Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium

6.	Mardiyah, S.Kep.Ns	Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan dan Jejaring Puskesmas
7.	Dwi Kurnia Hadi, AMK	Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan
8.	dr. Kartika Dwi Kurniasari	Penanggung Jawab Mutu

d. Dasar Hukum Penyajian Laporan Keuangan

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020.
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019.
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Prosedur Akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

b. Dasar Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1) Pengukuran Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset dan aset lainnya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

a) Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

b) Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

- 1) Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
- 2) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang biaya yang diterbitkan.
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding.
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hukum Pengadilan Pajak.
 - Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan.
 - Untuk piutang dalam valuta asing akan disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
 - Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
- 3) Pengakuan Piutang:
 - Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Ketetapan tentang Piutang.
 - Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.

- Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak daerah.

- 4) Pengakuan piutang yang berasal dari perikatan harus memenuhi kriteria:
 - Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - Jumlah piutang dapat diukur;
 - Telah diterbitkan surat penagihan; dan
 - Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

c) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun - 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	>2 tahun - 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

d) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan lainnya seperti donasi/rampasan.

Pengakuan Persediaan:

- 1) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- 3) Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi.
- 4) Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis, peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.

e) Aset Tetap

Aset tetap terdiri dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan dan instalasi; aset tetap lainnya; konstruksi dalam pengerjaan; dan akumulasi penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap:

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap:

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penugasan atas aset tetap tersebut telah berpindah.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan;

- Aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan.

Penyusutan Aset Tetap

- a) Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah metode garis lurus.
- b) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dan penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Pengukuran Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Pengukuran Kewajiban:

- a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.
- b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada surat utang Pemerintah Kota Pekalongan yang substansinya sama dengan SUN.
- c) Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar.
- d) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- e) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- f) Untuk utang Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban:

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3) Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- c) Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan/atau akan diterima.
- d) Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pendapatan Retribusi Daerah:

- a) Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- b) Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- c) Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD

Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

Pendapatan Pajak Daerah:

- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKPD diakui pada tanggal diterbitkannya SKPD tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

4) Pengukuran Belanja dan Beban

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut:

- a) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- b) Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap, belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja:

Belanja diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan.
- Terjadinya pengeluaran kas
Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan untuk pembayaran gaji pegawai, membiayai pelaksanaan suatu kegiatan.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Yang dimaksud dengan penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa adalah penurunan aktiva/potensi jasa yang terjadi sebagai akibat penggunaan aktiva tersebut.
- Koreksi atas belanja
Termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengakuan Belanja Barang Habis Pakai dan Belanja Modal

- a) Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - 1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak dijual.
 - 3) Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang sama dan/atau lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - 4) Pengeluaran selain peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang sama atau lebih dari Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 5) Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan/atau lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b) Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara.
 - 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang/jasa.
- c) Belanja Hibah
 - 1) Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
 - 2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan walikota.

- 3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
- 2) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- 3) Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- 4) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

e) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun beban direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar. Kemudian dibalik (*reverse*) pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.

f) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

g) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban adalah sebagai berikut:

- a) Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan.
- b) Beban diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs nilai tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dilakukan dalam pendapatan lain-lain.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp.	Rp.
Kas		
Kas di Bendahara Penerimaan	-	655.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Sub Jumlah	-	655.000,00
Kas di Bank		
Bank Jateng BLUD Rek. 3-007-25226-8	205.531.774,00	268.747.857,00
Bank Jateng BOK Rek. 3-007-25458-9	-	-
Bank BNI BOK Rek. 1590074639	115.513.955,00	-
Sub Jumlah	321.045.729,00	268.747.857,00
Jumlah Kas dan Setara Kas	321.045.729,00	269.402.857,00

Catatan :

1. Kas di Bank Jateng No. Rekening 3-007-25226-8 dan Bank Jateng No. Rekening 3-007-25458-9 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
2. Kas di Bank BNI BOK No. Rekening 1590074639 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 400.7 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekening Puskesmas Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

4. PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang Non Kapitasi BPJS per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp.	Rp.
Piutang BPJS Non Kapitasi	25.400.000	25.170.000
Praktik Klinik	175.000,00	-
Jumlah Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	25.575.000,00	25.170.000,00

Piutang BPJS Non Kapitasi

Bulan Pelayanan	Jumlah klaim	Tgl Verif	Jumlah Verif	Tgl Bayar
Piutang Subsequent Even				
Desember 2023 RJTP	16.305.000	10 Januari 2024	15.905.000	30 Januari 2024
Desember 2023 RITP	8.600.000	10 Januari 2024	8.600.000	30 Januari 2024
Deseber 2023 Kegiatan Kelom	895.000	10 Januari 2024	895.000	30 Januari 2024
Jumlah	25.800.000		25.400.000	

Piutang Subsequent Even sebesar Rp 25.400.000 merupakan piutang yang diverifikasi 10 Januari 2024 atau setelah tanggal neraca.

5. PENYISIHAN PIUTANG

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp.	Rp.
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(127.875,00)	(125.850,00)
Jumlah Penyisihan Piutang	(127.875,00)	(125.850,00)

Keterangan	Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	Umur Piutang	Prosentase (%)	Penyisihan Piutang
Piutang BPJS Non Kapitasi	25.575.000,00	< 1 tahun	0,50%	127.875,00
	-	1 s/d 2 tahun	10%	-
	-	2 s/d 5 tahun	50%	-
	-	>5 Tahun	100%	-
Jumlah				-

6. PERSEDIAAN

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp.	Rp.
Persediaan Alat Tulis Kantor	50.400,00	90.400,00
Persediaan Kertas dan Cover	305.500,00	350.000,00
Persediaan Bahan Komputer	80.000,00	80.000,00
Persediaan Perabot Kantor	6.869.500,00	6.877.000,00
Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.799.850,00	6.606.600,00
Persediaan Obat	133.017.798,66	145.396.679,08
Persediaan Obat-Obatan Lainnya	72.499.316,40	102.183.451,95
Persediaan Natura dan Pakan Lainnya	-	870.000,00
Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	99.900,00	99.900,00
Jumlah Persediaan	219.722.265,06	262.554.031,03

Tahun 2023

Persediaan	Saldo Awal	Kenaikan	Penurunan	Saldo Akhir
Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	4.800.400,00	4.800.400,00	-
Bahan Kimia	-	48.000,00	48.000,00	-
Bahan Bakar Dan Pelumas	-	23.111.948,00	23.111.948,00	-

Bahan Baku	-	40.000,00	40.000,00	-
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	665.000,00	665.000,00	-
Isi Tabung Gas	-	1.325.000,00	1.325.000,00	-
Suku Cadang Alat Angkutan	-	8.000,00	8.000,00	-
Suku Cadang Alat Kedokteran	99.900,00	916.000,00	916.000,00	99.900,00
Suku Cadang Alat Pertanian	-	75.000,00	75.000,00	-
Suku Cadang Lainnya	-	-	-	-
Alat Tulis Kantor	90.400,00	17.290.100,00	17.330.100,00	50.400,00
Kertas Dan Cover	350.000,00	15.491.310,00	15.535.810,00	305.500,00
Bahan Cetak	-	6.983.000,00	6.983.000,00	-
Benda Pos	-	1.497.000,00	1.497.000,00	-
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	50.703.835,00	50.703.835,00	-
Bahan Komputer	80.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	80.000,00
Perabot Kantor	6.877.000,00	28.150.900,00	28.158.400,00	6.869.500,00
Alat Listrik	-	5.935.400,00	5.935.400,00	-
Perlengkapan Dinas	-	6.000,00	6.000,00	-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.606.600,00	19.138.316,00	18.945.066,00	6.799.850,00
Obat	145.396.679,08	533.012.402,34	545.391.282,76	133.017.798,66
Obat-Obatan Lainnya	102.183.451,95	209.418.435,62	239.102.571,17	72.499.316,40
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	-	1.615.000,00	1.615.000,00	-
Natura	-	14.823.415,00	14.823.415,00	-
Natura Dan Pakan Lainnya	870.000,00	490.491.500,00	491.361.500,00	-
Pipa Plastik Pvc (Upvc)	-	160.000,00	160.000,00	-
Persediaan Penelitian Lainnya	-	2.500,00	2.500,00	-
Jumlah	262.554.031,03	1.426.952.461,96	1.469.784.227,93	219.722.265,06

Catatan :

Penurunan Persediaan Obat sebesar Rp 545.391.282,76 di dalamnya termasuk pengeluaran atas Obat ED sebesar Rp 2.216.914 dan Penurunan Persediaan Obat-obatan Lainnya sebesar Rp 239.102.571,76 didalamnya termasuk pengeluaran atas Obat ED sebesar Rp 9.433.908 sesuai dengan Kertas Kerja Persediaan.

7. ASET TETAP

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2023

Rp.				
	Saldo Awal	Kenaikan	Penurunan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Tanah	1.193.000.000,00			1.193.000.000,00
Peralatan dan Mesin	4.070.333.702,78	710.042.819,00	267.227.006,16	4.513.149.515,62
Gedung dan Bangunan	5.099.297.969,74	-		5.099.297.969,74
Jalan, Irigasi dan Jaringan	733.086.767,00			733.086.767,00
Aset Tetap Lainnya	957.500,00	-	500.000,00	457.500,00
Jumlah Aset Tetap	11.096.675.939,52	710.042.819,00	-	11.538.991.752,36
Akumulasi Penyusutan				
Gedung dan Bangunan	(865.985.324,00)	(101.799.792,00)	(71.426.534,00)	(896.358.582,00)
Peralatan dan Mesin	(3.665.784.799,78)	(194.066.759,00)	(412.584.065,16)	(3.447.267.493,62)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(185.226.903,00)	(24.407.049,00)	(19.138.928,00)	(190.495.024,00)
Jumlah	(4.716.997.026,78)	(320.273.600,00)		(4.534.121.099,62)
Nilai Buku				7.004.870.652,74

Catatan :

- a. Penambahan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp 710.042.819 terdiri atas :
 - Belanja Modal Tahun 2023 sebesar 164.100.500
 - Mutasi Masuk (Transfer) dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp 545.942.319 dengan rincian sebagai berikut

Nama Barang	BAST	Quantity	Harga	Jumlah
Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	028/4508/2023	1	773.000,00	773.000,00
Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	028/4508/2024	1	1.235.777,00	1.235.777,00
Tensimeter	028/4508/2025	1	940.000,00	940.000,00
Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	028/4508/2026	1	1.310.000,00	1.310.000,00
Examination Lamp	028/4508/2027	1	4.400.000,00	4.400.000,00
Pulse Oximeter	028/4508/2028	1	3.400.000,00	3.400.000,00
Suction Pump	028/4508/2029	1	7.975.000,00	7.975.000,00
Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	028/4508/2030	1	3.149.108,00	3.149.108,00
Anesthesi Apparatur	028/4508/2031	1	9.161.000,00	9.161.000,00
Nebulizer	028/4508/2032	1	1.307.000,00	1.307.000,00
Premature Infant Incubator	028/4508/2033	1	47.500.000,00	47.500.000,00

Combination Weight And Height Scale	028/4508/2034	21	10.497.150,00	220.440.150,00
Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi)	028/4508/2035	1	4.995.000,00	4.995.000,00
Resuscitator	028/4508/2036	1	52.210.000,00	52.210.000,00
Manual Resuscitation Set Adult & Child	028/4508/2037	1	2.182.000,00	2.182.000,00
Hematology Analyzer	028/4508/2038	1	120.589.284,00	120.589.284,00
Sterilizer (Alat Laboratorium)	028/4508/2039	1	64.375.000,00	64.375.000,00
Jumlah				545.942.319,00

- b. Pengurangan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin sebesar Rp 267.227.006,16 terdiri atas :
- Koreksi saldo awal atas koreksi BPK sebesar Rp 91.852.916
 - Reklas Peralatan Mesin ke Aset Lain-lain Rusak Berat sebesar Rp 171.774.090.
 - Reklas Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomtable sebesar Rp 3.600.000.
- c. Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 189.211.900 terdiri atas
- Beban Penyusutan Tahun Berjalan sebesar Rp 125.601.578.
 - Akumulasi atas aset dropping Dinas Kesehatan sebesar Rp 63.610.322.
- d. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 412.584.065,16 terdiri atas :
- Koreksi Saldo awal atas akumulasi penyusutan sebesar Rp 91.365.792.
 - Reklas Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin ke Akumulasi Aset Lain-lain Rusak berat sebesar Rp 159.673.196,99.
 - Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin atas perubahan kebijakan kapitalisasi Aset sebesar Rp 161.545.076.
- e. Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 101.799.792 merupakan beban penyusutan tahun berjalan.
- f. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 71.426.534,00 merupakan koreksi atas perubahan kebijaka kapitalisasi aset.
- g. Penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp 24.407.049 merupakan beban penyusutan tahun berjalan.
- h. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp 19.138.928,00 merupakan koreksi atas perubahan kebijakan kapitalisasi aset.

Tahun 2022

Rp.

	Saldo Awal	Kenaikan	Penurunan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Tanah	1.193.000.000,00		-	1.193.000.000,00
Peralatan dan Mesin	3.925.085.822,78	167.423.839,00	22.175.959,00	4.070.333.702,78
Gedung dan Bangunan	5.077.982.010,74	21.315.959,00		5.099.297.969,74
Jalan, Irigasi dan Jaringan	733.086.767,00		-	733.086.767,00
Aset Tetap Lainnya	957.500,00			957.500,00
Jumlah	10.930.112.100,52	188.739.798,00	22.175.959,00	11.096.675.939,52

Akumulasi Penyusutan				
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.434.028.252,78)	(231.756.547,00)		(3.665.784.799,78)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(764.185.535,00)	(101.799.789,00)		(865.985.324,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(160.815.678,00)	(24.411.225,00)		(185.226.903,00)
Jumlah	(4.359.029.465,78)	(357.967.561,00)	-	(4.716.997.026,78)
Nilai Buku	6.571.082.634,74			6.379.678.912,74

8.

ASET LAINNYA

Jumlah tersebut merupakan saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Aset Lain-lain - Aset Rusak	171.774.089,99	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(159.673.196,99)	-
Jumlah Aset Lainnya	<u>12.100.893,000</u>	<u>-</u>

9.

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Utang Belanja Pegawai		
Hutang yang Masih Harus Dibayar – Jasa Pelayanan PNS	33.101.324,00	57.163.006,00
Hutang yang Masih Harus Dibayar – Jasa Pelayanan NON PNS	79.723.154,00	21.487.252,00
Hutang yang Masih Harus Dibayar – Biaya Manajemen	21.824.804,00	12.803.311,00
Hutang yang Masih Harus Dibayar - Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.206.676,00	10.288.268,00
Jaminan Kesehatan PPPK	117.372,00	-
Utang Belanja Barang dan Jasa	-	-
Utang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Kesehatan	-	-
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	84.566,00	241.655,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.070.000,00	530.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.977.450,00	1.770.200,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	429.850,00	369.300,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	<u><u>139.535.196,00</u></u>	<u><u>104.652.992,00</u></u>

10. PENDAPATAN JASA LAYANAN

Jumlah tersebut merupakan pendapatan dari kegiatan operasional untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Jasa Layanan		
Layanan Umum	246.668.000,00	232.560.000,00
BPJS Kesehatan - Kapitasi	1.483.840.729,00	1.198.367.100,00
BPJS Kesehatan - Non Kapitasi	397.656.850,00	277.722.975,00
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan	2.128.165.579,00	1.712.365.075,00

11. PENDAPATAN ANTAR ENTITAS AKUNTANSI PELAPORAN

Jumlah tersebut merupakan pendapatan dari Dropping Dinas Kesehatan Kota pekalongan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp.	Rp.
Pendapatan Dropping - Persediaan	770.555.842,96	1.073.539.047,38
Pendapatan Dropping - Aset Tetap	545.942.319,00	-
Jumlah	1.316.498.161,96	1.073.539.047,38

Catatan :

- Pendapatan antar entitas akuntansi pelaporan pada laporan SIMDA dicatat sebagai Koreksi Ekuitas Dampak
- a. Kumulatif Dasar.
 - b. Dropping persediaan sebesar Rp 770.555.842,96 terdiri atas :

Keterangan	Jumlah
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	30.472.200,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	142.500,00
Obat	531.151.302,34
Obat-Obatan Lainnya	202.508.425,62
Natura	6.281.415,00
Jumlah	770.555.842,96

- c. Dropping Aset Tetap sebesar Rp 545.942.319,00 terdiri atas Drooping Peralatan dan Mesin sesuai dengan Kertas Kerja Aset.

12. PENDAPATAN HIBAH

Jumlah tersebut merupakan pendapatan dari hibah kemenkes untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp.	Rp.
Pendapatan Hibah	-	-
Jumlah Pendapatan hibah	-	-

13. PENDAPATAN HASIL KERJASAMA

Jumlah tersebut merupakan pendapatan hasil kerjama untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp.	Rp.
Pendapatan Hasil Kerjasama - Parkir	3.120.000,00	2.920.000,00
Pendapatan Hasil Kerjasama - Praktik Klinik Mahasiswa	175.000,00	-
Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama	3.295.000,00	2.920.000,00

14. LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH

Jumlah tersebut merupakan pendapatan lain-lain BLUD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp.	Rp.
Pendapatan Bunga Bank	428.947,00	315.812,00
Jumlah	428.947,00	315.812,00

Lain-lain pendapatan BLUD yang Sah merupakan pendapatan atas jasa giro.

15. PENDAPATAN APBD/APBN

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan BOK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp.	Rp.
Pendapatan BOK	1.015.070.000,00	844.585.000,00
Jumlah	1.015.070.000,00	844.585.000,00

Pendapatan APBD/APBN sebesar Rp 1.015.070.000,00 pada Laporan SIMDA dicatat sebagai kewajiban dikonsolidasikan.

16. BEBAN PEGAWAI

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp.	Rp.
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	563.273.552,00	308.775.658,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.469.900,00	11.158.533,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	117.372,00	-
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	149.882.384,00	114.684.047,00
Jumlah Beban Pegawai	729.743.208,00	434.618.238,00

17. BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah tersebut merupakan beban barang dan jasa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp.	Rp.
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.800.400,00	822.500,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	48.000,00	130.500,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.111.948,00	15.612.128,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	100.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	665.000,00	-
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.325.000,00	382.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	916.000,00	170.000,00
Beban Suku Cadang Alat Pertanian	75.000,00	40.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	-	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8.000,00	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	-	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.330.100,00	8.995.570,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	15.535.810,00	20.470.650,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.983.000,00	8.556.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.497.000,00	1.651.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	50.703.835,00	47.943.750,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.244.000,00	1.544.100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	28.158.400,00	18.633.600,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.935.400,00	3.475.900,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	-	5.627.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.945.066,00	8.769.800,00
Beban Obat-Obatan-Obat	545.391.282,76	677.749.293,59
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	239.102.571,17	333.091.304,24
Beban Natura dan Pakan-Natura	14.823.415,00	44.803.100,00
Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	491.361.500,00	223.514.991,00
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	160.000,00	-
Beban Bahan Baku	40.000,00	100.000,00
Beban Bahan Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	1.037.000,00
Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	2.500,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.000,00	-
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.615.000,00	-
Jumlah	1.469.784.227,93	1.423.220.686,83
Beban Jasa Kantor		
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.800.000,00	9.600.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	2.050.000,00	2.800.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	918.912.172,00	881.240.162,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.215.000,00	-

Beban Jasa Tenaga Kebersihan	10.528.950,00	2.080.000,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	1.800.000,00	1.800.000,00
Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	15.000.000,00	15.000.000,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	806.900,00	110.200,00
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	550.000,00	7.627.500,00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	130.000,00	-
Beban Jasa Kalibrasi	14.443.240,00	-
Beban Jasa Pengolahan Sampah	9.466.216,00	14.016.826,00
Beban Tagihan Telepon	1.875.906,00	2.106.268,00
Beban Tagihan Air	7.892.500,00	8.206.500,00
Beban Tagihan Listrik	56.842.300,00	31.610.022,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.693.580,00	7.511.000,00
Beban Paket/Pengiriman	117.000,00	22.300,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	473.100,00	922.800,00
Jumlah	1.067.596.864,00	984.653.578,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi		
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	120.000,00	-
Jumlah	120.000,00	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	60.586.700,00	44.842.400,00
Jumlah	60.586.700,00	44.842.400,00
Beban Perjalanan Dinas		
Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.370.000,00	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	135.400.000,00	74.550.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	158.600.000,00	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Luar Kota	3.843.750,00	344.580.000,00
Jumlah	300.213.750,00	419.130.000,00
Beban Pemeliharaan		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	350.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	6.680.166,00	7.349.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	350.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.275.600,00	8.110.000,00
Beban Pemeliharaan -Alat Pemadam Kebakaran	174.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	1.515.000,00

Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	-	75.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	777.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	6.028.650,00	-
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.575.000,00	2.765.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.797.500,00	905.000,00
Jumlah	25.007.916,00	20.719.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	57.735.050,00	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	-	29.474.080,00
Jumlah	57.735.050,00	29.474.080,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	10.830.000,00	-
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	-	-
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	3.315.000,00	-
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	2.803.000,00	1.385.000,00
Beban Pemeliharaan Instalasi - Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.689.000,00	900.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon Lainnya	220.000,00	-
Jumlah	18.857.000,00	2.285.000,00
Jumlah Beban Pemeliharaan	101.599.966,00	52.478.080,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi		
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	23.562.456,00	22.681.234,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	25.747.945,00	23.625.624,00
Jumlah	49.310.401,00	46.306.858,00
Beban Ekstrakomptable		
Beban Ekstrakomptable	4.786.777,00	-
Jumlah	4.786.777,00	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa	3.053.998.685,93	2.970.631.602,83

18. BEBAN PENYUUSTAN DAN AMORTISASI

Jumlah tersebut merupakan beban penyusutan aset tetap untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	Rp.	Rp.
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	130.456.437,00	231.756.547,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	101.799.792,00	101.799.789,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	24.407.049,00	24.411.225,00
Jumlah	<u><u>256.663.278,00</u></u>	<u><u>357.967.561,00</u></u>

19. BEBAN PENYISIHAN

Jumlah tersebut merupakan beban penyisihan piutang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	Rp.	Rp.
Beban Penyisihan Piutang	127.875,00	125.850,00
Jumlah Beban Penyisihan Piutang	<u><u>127.875,00</u></u>	<u><u>125.850,00</u></u>

20. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen bertanggungjawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 yang diselesaikan pada 29 Maret 2024.